GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

DINAMIKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT DI KABUPATEN TUBAN

Diyah Nurmawati[1], Singgih Manggalou[2]
[1,2]Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Email Korespondensi: diyahnurma567@gmail.com
Email: singgih.m.adneg@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze forms of community participation in the implementation of the Sekolah Rakyat Program in Tuban Regency, a national policy designed to reduce school dropout rates through the provision of boarding-based education for children from poor families, particularly those classified in deciles 1 and 2. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies involving thirteen informants selected through purposive sampling. The data were analyzed using the Miles and Huberman model, guided by the concept of participation developed by Keith Davis and John W. Newstrom (1985), which encompasses three dimensions: mental and emotional involvement, contribution, and responsibility. The findings indicate that community participation developed gradually, progressing from initial doubts about the boarding education system toward acceptance and full support, as reflected in moral support, prayers, active student involvement, and shared responsibility among the government, school, and family. Nevertheless, two cases of student withdrawal were identified, indicating limitations in participation when faced with structural issues, such as extreme poverty and family dysfunction. This study concludes that the success of the Sekolah Rakyat Program in Tuban Regency is largely determined by the synergy of participation among the government, school, family, and students.
Keywords: Community participation, Sekolah Rakyat, Boarding-school education, Poverty.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tuban, sebuah kebijakan nasional yang dirancang untuk memutus angka putus sekolah melalui penyelenggaraan pendidikan berasrama bagi anak dari keluarga miskin terutama desil 1 dan desil 2. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap tiga belas informan yang dipilih secara purposive, kemudian dianalisis mengikuti model Miles dan Huberman dengan berpedoman pada konsep partisipasi Keith Davis dan John W. Newstrom (1985) yang mencakup tiga dimensi, yaitu keterlibatan mental emosional, kontribusi, dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terbentuk secara bertahap, bergerak dari keraguan awal terhadap sistem pendidikan berasrama menuju penerimaan dan dukungan penuh yang tercermin dari dukungan moral, doa, keterlibatan aktif peserta didik, serta tanggung jawab berlapis antara pemerintah, sekolah, dan keluarga. Meskipun demikian, ditemukan pula dua kasus pengunduran diri peserta didik yang mengindikasikan adanya keterbatasan partisipasi ketika berhadapan dengan persoalan struktural, seperti kemiskinan ekstrem dan disfungsi keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tuban sangat ditentukan oleh sinergi partisipasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan peserta didik.
Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Sekolah Rakyat, Pendidikan berasrama, Kemiskinan.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan meeruupakan salah satu instrumen utama pembangunan manusia yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Komitmen negara terhadap pemerataan pendidikan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang mengatur penyelenggaraan program wajib belajar sebagai upaya memberikan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara Namun demikian, capaian di lapangan menunjukkan bahwa akses pendidikan belum sepenuhnya merata. Data Badan Pusat Statistik (2025) mencatat 4.160.429 anak usia 7–18 tahun berstatus putus sekolah atau tidak bersekolah di Indonesia. Yulianto Umar Rofi'i, (2024) menjelaskan bahwa anak dari keluarga berpenghasilan rendah di wilayah pedesaan menghadapi risiko putus sekolah yang lebih tinggi karena kerap diposisikan sebagai tenaga kerja tambahan dalam rumah tangga, sehingga faktor ekonomi menjadi determinan dominan atas keputusan keluarga untuk tidak melanjutkan pendidikan anak.

Pola serupa juga tampak pada tingkat regional maupun lokal. Menurut Badan Pusat Statistik, (2025) di Provinsi Jawa Timur, persentase putus sekolah meningkat seiring jenjang pendidikan dari 0,17 persen pada jenjang SD/MI menjadi 1,74 persen pada jenjang SMA/MA yang mengindikasikan tantangan pada fase transisi pendidikan dan lebih banyak ditemukan pada keluarga miskin di wilayah pedesaan (Setyadi, 2022). Data Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, (2025), Kabupaten Tuban turut mengalami kenaikan signifikan, dari 1,63 persen pada 2024 menjadi 3,64 persen pada 2025 yang antara lain dipengaruhi keterbatasan akses transportasi dan fasilitas pendidikan di beberapa kecamatan. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa kemiskinan dan pendidikan merupakan dua persoalan yang saling mengunci rendahnya pendidikan memperbesar peluang kemiskinan, sementara kemiskinan membatasi akses terhadap pendidikan (Asri & Hanifa, 2025).

Sebagai respons atas persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang salah satu wujudnya adalah Program Sekolah Rakyat sekolah gratis berbasis asrama bagi anak dari keluarga miskin dari desil 1 dan desil 2.. Seluruh kebutuhan pendidikan, tempat tinggal, konsumsi, dan perlengkapan belajar peserta didik ditanggung negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025, terdapat 24 lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi yang ditetapkan secara nasional, salah satunya adalah Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Meskipun dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok miskin, keberhasilan program semacam ini pada praktiknya tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, melainkan juga oleh kesiapan peserta didik dan keluarga untuk beradaptasi dengan sistem pendidikan berasrama.

Fenomena tersebut tampak nyata pada pelaksanaan Sekolah Rakyat Kabupaten Tuban. Sejumlah calon peserta didik menolak mengikuti program karena berperan penting dalam aktivitas ekonomi keluarga, seperti membantu bekerja di sawah maupun ladang. Bahkan setelah program berjalan, dua dari lima puluh peserta didik yang diterima memutuskan mengundurkan diri, pihak sekolah menjelaskan bahwa penyebab utamanya adalah kesulitan beradaptasi dengan kehidupan asrama dan belum siap tinggal jauh dari keluarga, sebagaimana juga dilaporkan oleh media lokal (Radar Bonang, 2026). Di sisi lain, mayoritas peserta didik tetap bertahan mengikuti program hingga saat ini. Perbedaan respons ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana bentuk partisipasi masyarakat khususnya orang tua dan keluarga dalam mendukung keberlangsungan Program Sekolah Rakyat, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan program publik semacam ini tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif kelompok sasarannya.

Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada teori partisipasi yang dikemukakan oleh Davis dan Newstrom (1985), sebagaimana dikutip dalam Hamid (2018), yang mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan individu secara mental maupun emosional dalam suatu kelompok yang mendorongnya memberikan sumbangsih bagi pencapaian tujuan bersama, disertai kesediaan memikul tanggung jawab atas pencapaian tersebut. Teori ini menguraikan partisipasi ke dalam tiga dimensi yang saling berkaitan.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

Pertama, keterlibatan mental dan emosional (psychological involvement), yaitu keterlibatan pikiran dan perasaan individu yang mendorong munculnya rasa memiliki terhadap suatu program. Kedua, kontribusi (contribution), yaitu kesediaan individu memberikan sumbangan nyata baik berupa tenaga, dana, pemikiran, waktu, maupun dukungan moral untuk mendukung pencapaian tujuan bersama. Ketiga, tanggung jawab (responsibility), yaitu kesediaan menanggung konsekuensi serta menjaga keberlanjutan keterlibatan tersebut hingga tujuan tercapai. Ketiga dimensi ini digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk memahami bagaimana masyarakat, khususnya orang tua, keluarga, dan peserta didik, terlibat dalam mendukung keberlangsungan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tuban. Dengan demikian, partisipasi tidak semata dimaknai sebagai kehadiran fisik, melainkan tercermin melalui dukungan, kontribusi nyata, dan tanggung jawab yang berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji Program Sekolah Rakyat maupun partisipasi masyarakat dalam program sejenis, namun dengan penekanan yang berbeda. (Anggraini & Tukiman, 2025) mengkaji partisipasi masyarakat dalam program percepatan penurunan stunting menggunakan teori Cohen dan Uphoff. (Muharam, 2025) serta (Nisa et al., 2026) berfokus pada implementasi kebijakan Sekolah Rakyat dari perspektif pemerintah dengan kerangka Edward III. (Kasmir et al., 2025) dan (Rafid et al., 2025) menyoroti peran Sekolah Rakyat dalam kesetaraan pendidikan dan pendidikan kritis melalui perspektif Freire. Meskipun keempat penelitian tersebut relevan, belum ditemukan kajian yang secara khusus menelaah partisipasi masyarakat sebagai kelompok sasaran program menggunakan kerangka Davis dan Newstrom; celah inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana bentuk dan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tuban? Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam program tersebut, dengan menggunakan tiga indikator partisipasi Davis dan Newstrom (1985), yaitu keterlibatan mental dan emosional, kontribusi, serta tanggung jawab, guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai kontribusi masyarakat terhadap pemerataan akses pendidikan sekaligus upaya penanggulangan kemiskinan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada posisinya yang secara khusus menempatkan masyarakat bukan pemerintah maupun pelaksana kebijakan sebagai unit analisis utama dalam mengkaji keberhasilan Program Sekolah Rakyat. Berbeda dengan penelitian implementasi kebijakan yang umumnya menilai keberhasilan program dari sisi kesiapan birokrasi, penelitian ini berupaya memahami bagaimana partisipasi terbentuk dari sisi penerima manfaat, termasuk dinamika psikologis dan sosial yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini penting mengingat Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan yang relatif baru diluncurkan pada tahun 2025, sehingga kajian mengenai respons dan keterlibatan masyarakat pada tahap awal pelaksanaannya menjadi sangat relevan untuk memberikan masukan bagi perbaikan program secara berkelanjutan, baik di Kabupaten Tuban maupun di lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi lain di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada tiga alasan utama. Pertama, Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan nasional yang baru diluncurkan pada tahun 2025 sehingga belum banyak kajian akademik yang mengevaluasi dinamika penerimaannya di tingkat masyarakat, padahal keberhasilan tahap awal implementasi sangat menentukan keberlanjutan program di 24 lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi lainnya di Indonesia. Kedua, munculnya kasus pengunduran diri peserta didik di tengah tingginya animo pendaftar menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dijelaskan secara akademik antara minat awal masyarakat dan keberlanjutan partisipasi mereka sepanjang program berjalan. Ketiga, kajian yang berangkat dari perspektif masyarakat sebagai kelompok sasaran, bukan dari sisi kesiapan birokrasi pelaksana, masih terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang lebih membumi bagi perbaikan kebijakan Sekolah Rakyat secara berkelanjutan.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam konteks sosial yang alamiah (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena partisipasi masyarakat merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dinamis, sehingga memerlukan eksplorasi mendalam yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Sekolah Rakyat Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung dan pemahaman mendalam terhadap Program Sekolah Rakyat, menghasilkan tiga belas informan yang terdiri atas satu staf Dinas Sosial Kabupaten Tuban, satu Kepala Sekolah Rakyat, satu tenaga pengajar, satu wali asrama, satu Pendamping Program Keluarga Harapan, lima peserta didik, serta tiga orang tua/wali murid. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk menjangkau perspektif multi-aktor, mulai dari pembuat dan pelaksana kebijakan hingga kelompok sasaran program sebagai penerima manfaat langsung.

Data primer dikumpulkan melalui dua teknik. Pertama, wawancara mendalam bersifat semi-terstruktur per informan, menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tiga indikator partisipasi Davis dan Newstrom (1985), yakni keterlibatan mental dan emosional, kontribusi, dan tanggung jawab. Kedua, observasi lapangan non-partisipatif dilakukan untuk mengamati interaksi antara peserta didik, wali asrama, dan orang tua selama kegiatan asrama maupun kunjungan keluarga. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa arsip data sasaran, laporan program, dan dokumentasi foto kegiatan. Analisis data mengikuti model interaktif (Miles et al, 2014) yang terdiri atas tiga tahap berkelanjutan: reduksi data melalui pemilahan dan pengelompokan informasi sesuai indikator partisipasi; penyajian data dalam bentuk narasi dan matriks tematik; serta penarikan dan verifikasi kesimpulan yang dilakukan secara iteratif sepanjang proses penelitian. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan antarinforman lintas peran), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi), serta triangulasi waktu (konfirmasi ulang temuan pada waktu pengambilan data yang berbeda), guna memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan yang diperoleh.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Kesenjangan Sasaran Daya Tampung

Sekolah Rakyat Kabupaten Tuban mulai beroperasi pada tahun 2025 dengan jenjang SMP dan SMA yang terintegrasi dalam satu kompleks berasrama, dengan kapasitas 50 peserta didik (25 siswa jenjang SMP dan 25 siswa jenjang SMA). Sarana yang tersedia mencakup ruang kelas, empat unit asrama, dapur umum, perpustakaan, masjid, dan laboratorium komputer. Meskipun demikian, ditemukan keterbatasan pada kapasitas dapur umum yang belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan konsumsi seluruh peserta didik secara mandiri, sehingga sebagian kebutuhan makan masih dipenuhi melalui jasa katering. Temuan ini mengindikasikan bahwa kondisi sarana-prasarana berperan sebagai prakondisi yang membangun kepercayaan awal masyarakat, namun bukan merupakan penentu utama partisipasi terbukti dari tingginya animo pendaftar meskipun fasilitas belum sepenuhnya ideal.

Data penjaringan menunjukkan sebanyak 364 calon peserta didik terdaftar sebagai sasaran program, sementara daya tampung yang tersedia hanya 50 kursi. Dari jumlah tersebut, 307 calon peserta didik (85%) berasal dari kelompok kesejahteraan desil 1 dan 2 berdasarkan data DTSEN, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Sasaran dan Daya Tampung Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban

Kategori	Jumlah	Persentase terhadap Sasaran
Total calon peserta didik (sasaran)	364	100%

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

Kategori	Jumlah	Persentase terhadap Sasaran
Peserta didik diterima (daya tampung)	50	13,7%
Belum tertampung	314	86,3%
Berasal dari desil 1 & 2 (dari total sasaran)	307	84,3%

Besarnya kesenjangan antara jumlah sasaran dan daya tampung ini menegaskan bahwa rendahnya jumlah peserta didik yang diterima bukan cerminan rendahnya partisipasi masyarakat, melainkan keterbatasan kapasitas program itu sendiri di tengah tingginya minat masyarakat miskin terhadap akses pendidikan gratis berasrama.

Pelaksanaan program ini melibatkan banyak aktor secara berjenjang, mulai dari Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Kabupaten Tuban sebagai penanggung jawab kebijakan, Pendamping Program Keluarga Harapan sebagai ujung tombak verifikasi lapangan dan pendampingan keluarga, hingga tenaga pendidik dan wali asrama yang menjalankan fungsi pengasuhan harian. Proses penjaringan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan oleh Pendamping PKH guna memastikan ketepatan sasaran berdasarkan data DTSEN, sebelum diteruskan pada tahap seleksi administratif oleh pihak sekolah. Rangkaian proses ini memperlihatkan bahwa ketepatan sasaran program sesungguhnya juga merupakan hasil dari kolaborasi dan kepercayaan yang terbangun antara petugas lapangan dan masyarakat calon penerima manfaat.

Keterlibatan Mental dan Emosional

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keterlibatan mental dan emosional masyarakat berkembang melalui empat tahap yang saling berurutan. Pada tahap awal, orang tua menunjukkan keraguan terhadap sistem pendidikan berasrama, baik karena kekhawatiran psikologis melepas anak tinggal jauh dari rumah, maupun kekhawatiran institusional terkait keberlanjutan program sebagai kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi terhenti apabila terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Keraguan tersebut kemudian bertransformasi melalui pertimbangan rasional ekonomis ketidakmampuan membiayai pendidikan anak secara mandiri menjadi pendorong utama keputusan mengikutsertakan anak ke dalam program.

Selanjutnya, keterlibatan emosional aktif terbentuk seiring proses adaptasi peserta didik terhadap kehidupan asrama, yang secara rata-rata membutuhkan waktu enam bulan dan sangat dipengaruhi oleh intensitas relasi psikologis dalam keluarga. Tahap akhir berupa penerimaan dan tumbuhnya rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap program, yang terbentuk setelah masyarakat memperoleh pendampingan intensif dari Dinas Sosial dan Pendamping Program Keluarga Harapan. Pendampingan ini berperan sebagai mediator yang meyakinkan masyarakat, baik dari sisi kebenaran informasi program maupun manfaat jangka panjangnya. Pola bertahap ini memperkuat pandangan Davis dan Newstrom bahwa keterlibatan mental emosional bukan kondisi statis, melainkan proses yang terbentuk melalui interaksi berkelanjutan antara individu dan lingkungan sosialnya.

Kontribusi Masyarakat

Pada indikator kontribusi, mayoritas bentuk partisipasi masyarakat bersifat non-material berupa motivasi, doa, dan tirakat yang mencerminkan dimensi budaya dan religius masyarakat Tuban. Bentuk kontribusi non-material lain tampak dari kunjungan rutin ke asrama serta pemberian makanan kesukaan maupun uang saku. Temuan yang relatif jarang dibahas dalam literatur partisipasi konvensional adalah adanya kontribusi tersembunyi, yaitu kesediaan orang tua merelakan hilangnya bantuan tenaga anak dalam aktivitas ekonomi rumah tangga demi keberlangsungan pendidikan anak sebuah bentuk pengorbanan yang

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

mencerminkan tingginya komitmen keluarga terhadap pendidikan.

Kontribusi peserta didik sendiri tampak melalui keaktifan mengikuti pembelajaran, kepatuhan terhadap jadwal kegiatan asrama, serta keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler, yang menegaskan bahwa peserta didik bukan sekadar objek melainkan turut menjadi aktor partisipasi. Penelitian ini juga menemukan variasi pola kontribusi orang tua: sebagian aktif menghubungi pihak sekolah, sementara sebagian lain bersikap pasif dan hanya memantau perkembangan anak melalui grup komunikasi digital. Variasi tersebut lebih tepat dimaknai sebagai keberagaman cara masyarakat berpartisipasi dipengaruhi oleh rasa segan dan tingkat literasi digital bukan sebagai indikator rendahnya partisipasi.

Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat terwujud secara berlapis dan saling bergantung antaraktor. Pemerintah bertanggung jawab tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga meluas hingga program pemberdayaan ekonomi keluarga berupa dana usaha dan renovasi rumah. Sekolah, guru, dan wali asrama bertanggung jawab dalam pendampingan harian serta pendekatan persuasif untuk mempertahankan peserta didik. Orang tua menunjukkan tanggung jawab melalui konsistensi menjaga komitmen pendidikan anak meskipun anak sempat menunjukkan tanda-tanda tidak betah, sedangkan peserta didik menunjukkan tanggung jawabnya melalui kesediaan bertahan dan kemampuan mengelola kerinduan terhadap keluarga secara konstruktif.

Namun demikian, dua kasus pengunduran diri peserta didik menjadi catatan kritis dalam penelitian ini. Kasus pertama melibatkan peserta didik dari keluarga broken home yang tinggal bersama nenek, disertai hambatan komunikasi akibat keterbatasan akses telepon di lingkungan asrama. Kasus kedua melibatkan peserta didik yang terbiasa bekerja dan memilih kembali bekerja atas persetujuan orang tua karena desakan kebutuhan ekonomi. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kelembagaan memiliki batas ketika berhadapan dengan kondisi struktural di luar kendali sekolah maupun orang tua, seperti kemiskinan ekstrem dan disfungsi keluarga.

Secara keseluruhan, ketiga indikator partisipasi Davis dan Newstrom (1985) terbukti relevan dalam menjelaskan partisipasi masyarakat pada Program Sekolah Rakyat Kabupaten Tuban, namun ketiganya tidak berdiri sendiri melainkan membentuk satu rangkaian yang saling menjelaskan. Temuan mengenai kontribusi non-material yang dominan turut memperkaya kerangka teori Davis dan Newstrom dengan menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat Tuban, dukungan spiritual memiliki peran yang sama pentingnya dengan dukungan material dalam membentuk partisipasi masyarakat.

Meskipun demikian, dua kasus pengunduran diri peserta didik menjadi pengingat bahwa teori partisipasi Davis dan Newstrom cukup menjelaskan bagaimana tanggung jawab individu terbentuk, tetapi kurang menjangkau kondisi struktural di luar kendali individu seperti kemiskinan ekstrem dan disfungsi keluarga yang dapat membatalkan partisipasi meskipun niat dan komitmen telah ditunjukkan oleh berbagai pihak. Dengan demikian, keberhasilan Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tuban merupakan hasil sinergi lintas-aktor antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan peserta didik, yang saling melengkapi melalui keterlibatan mental-emosional sebagai fondasi, kontribusi sebagai bentuk nyata partisipasi, dan tanggung jawab sebagai penentu keberlanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tuban tergolong tinggi sejak tahap awal, sebagaimana tercermin dari 364 calon peserta didik yang mendaftar, jauh melampaui daya tampung sebanyak 50 siswa. Dalam pelaksanaannya, partisipasi terwujud melalui tiga indikator Davis dan Newstrom (1985), yaitu keterlibatan mental dan emosional, kontribusi, dan tanggung jawab. Keterlibatan mental dan emosional sebagian keluarga mengalami penguatan dari keraguan awal menuju penerimaan melalui edukasi dan pendampingan. Kontribusi masyarakat terutama berupa dukungan moral, komunikasi, dan kerelaan melepas peran ekonomi anak di

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

rumah. Sementara itu, sekolah berkontribusi melalui pembinaan karakter dan penciptaan lingkungan belajar yang mendukung. Tanggung jawab dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah, sekolah, guru dan wali asrama, orang tua, serta peserta didik.

Dalam pelaksanaan program, Dinas Sosial Kabupaten Tuban menjadi *leading sector* yang berperan dalam mengoordinasikan program, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga sasaran, serta memastikan adanya pendampingan. Dinas Sosial juga melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menyampaikan informasi, memberikan pemahaman mengenai sistem pendidikan berasrama, dan mendampingi keluarga serta peserta didik. Kolaborasi antara Dinas Sosial, pendamping PKH, sekolah, orang tua, dan peserta didik menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan partisipasi masyarakat. Meskipun partisipasi masyarakat tergolong tinggi secara kuantitas, program masih menghadapi keterbatasan struktural. Dua kasus pengunduran diri siswa yang dipengaruhi kondisi keluarga dan tekanan ekonomi menunjukkan bahwa komitmen partisipatif belum selalu mampu mengatasi kerentanan di luar kendali individu. Oleh karena itu, keberhasilan Program Sekolah Rakyat tidak dapat dibebankan pada satu pihak, tetapi memerlukan sinergi dan pendampingan berkelanjutan antaraktor.

REFERENSI

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.

Anggraini, T., & Tukiman. (2025). Partisipasi masyarakat dalam program percepatan penurunan stunting "SOTH" di Kota Surabaya. Journal Publicuho, 8(3), 1379–1386.

Asri, Y. A. G., & Hanifa, N. (2025). Pengaruh pengangguran, PDRB, dan partisipasi sekolah terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Journal of Economics, 5, 30–43.

Badan Pusat Statistik. (2025). Jumlah anak putus sekolah di Indonesia. BPS.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. (2025). Data angka putus sekolah Kabupaten Tuban.

Hamid, I. H. (2018). Manajemen pemberdayaan masyarakat (T. S. Razak, Ed.). De La Macca.

Kasmir, Ardiansyah, M., & Arismunandar. (2025). The role of the Sekolah Rakyat program as an effort to promote educational equity. Journal of Education, Language Teaching and Science, 7(3), 1489–1499.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldāna, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE.

Muharam, K. I. (2025). Implementasi kebijakan Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI (Studi kasus: Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan). Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 15(1), 1–12.

Nisa, R. R. D., Khanifah, L. N., Zulayka, S., Pasya, A. N., Sayidina, A. K., & Lestari, A. C. M. (2026). Analisis implementasi Program Sekolah Rakyat dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten. 3(3), 1339–1350.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Rakyat Terintegrasi.

Radar Bonang. (2026, Maret 30). Tidak kerasan di asrama, dua siswa SR Terintegrasi 18 Tuban mengundurkan diri. https://radarbonang.jawapos.com

Rafid, R., Nurita, R. F., & Dores, D. (2025). Public schools and critical education: Alternative education policy in Indonesia. Journal of Social, Humanity, and Education, 6(1), 119–132.

Rofi'i, Y. U. (2024). Kemiskinan pedesaan dan angka partisipasi sekolah di Indonesia. 8(2), 783–791.

Setyadi, S. (2022). Inequality of education in Indonesia by gender, socioeconomic background and government expenditure. 27–36.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.